



PERAN PPN KEJAWANAN DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR KOTA CIREBON

Ridwan Widagdo

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon
E-mail: ridwanwidagdo@gmail.com

Abstrak

Rgo dgtf c{ ccp" o cu{ ctncv" r gukuk" ucpi cv" f kr gtwnep" net gpc" r qvgnuk" uwo dgt" f c{ c" crco p{ c" { cpi " dguct0' Pco wp" r cf c" ngp{ cxccpp{ c" j kpi i c" uccv" kp' ugdc i kep" dguct" o cu{ ctncv" r gukuk" o culj " o gtwrcnep" dc i kep" f ct k' o cu{ ctncv" { cpi " vgtvki i cr' f kdcpf kpi nep" f gpi cp" ngiqo r qmi" o cu{ ctncv" rckpp{ c0' Rgpgrkcp" kp' dgtwncp" wpwni" o gpi gvcj wk' nqpf kuk' O cu{ ctncv" Rgukuk" Mgley cpcp" Mqvc" Ektgdqp" f cp" Rgtcp" RRP" f crco " Rgo dgtf c{ ccp" o cu{ ctncv" gnppqo k' Rgukuk" Mgley cpcp0' Rgpgrkcp" kp' o gpi i wpcnep" r gpf gncwp" mwrkcvk" f gpi cp" o gxf g" y cy cpectc" vgtj cf cr" kplqto cp0' J cuki' Rgpgrkcp" o gpwplwncp" dcj y c" Mgj lf wr cp" r ctc" pgrc{ cp" f k' y krc{ cj " RRP" Mgley cpcp" Ektgdqp" f crco " ngcf ccp" o go r t k j cvkncp. " net gpc" f crco " ugnrc k' o grcw" r gpf cr cvcp" o gtgnrc" vlf cni' ugdc pf kpi " f gpi cp" r gpi gwctcp" wpwni' uqrc. " o cnep lo kpw . " f cp" rqi kank' rckpp{ c0' Vgo r cv' r grgncpi cp" knep" vlf cni' lugo wcp{ c" cmkrc=dcj nep" j cp{ c" ucw' { cpi " cmkrc0' Rgo dgtf c{ ccp" { cpi " f krcwncp" RRP" Mgley cpcp" dgrwo " ewmr " o co rw" o gpkpi ncncp" nguglcj vgtccp" pgrc{ cp0'"

Kata Kunci: PPN Kejawanan, ekonomi, masyarakat pesisir

Abstract

Vj g" go r qy gto gpv' qh' eqcuwn' eqo o wpkkgu" ku" kpf kur gpucdrng" dgecwug" qh' vj g" r qvgnuk' n' o clqt" pcwrcni' tguqwtegu0' J qy gxgt. " kp' t gcrk' v' wpvki' pqy " rcti grf " vj g" r gqrng' r k' kpi " kp' vj g" eqcuw' ct g' ukni' c" r ctv' qh' uqekgv " r k' kpi " wpf gtf gxgrgr gf " eqo r ct gf " vq" qvj gt" i tqwr u0' Vj ku" umf { " cko u" vq" f gvgto kpg" vj g" eqpf k' kqp" qh' vj g" Eqcuwn' Eqo o wpkkgu" qh' Mgley cpcp" Ektgdqp" cpf " vj g" tqrg" qh' RRP" kp' vj g" Eqcuwn' Geppqo ke" Eqo o wpkk' " Go r qy gto gpv' qh' Mgley cpcp0' Vj ku" umf { " wugu" c" swrckcvkxg" crrtqcej. " y kj " o gvj qf u" qh' kpvgtxkgy u" y kj " kplqto cpw0' T gugtej " uj qy u" vj cv' vj g" rihg" qh' vj g" hkuj gto gp" kp' vj g" ctgc" qh' RRP" Mgley cpcp" Ektgdqp" ku" kp' c" r qqt" ucvg. " dgecwug" vj g" kpego g" qpeg" vj g" gctp" ku' pqv' eqo r ctcdrg" y kj " vj g" zr gpf kwt g" lqt" f kgugn' hwn" gcvki " lf tkpni . " cpf " qvj gt" rqi kank' u0' Vj g" eqpf k' kqp" qh' vj g" hkuj " cwekqp" ku' pqv' cni' cevkxg= gxgp" qprf " qpg0' Vj g" go r qy gto gpv' qh' vj g" RRP" Mgley cpcp" ku' pqv' gpqwi j " vq" ko r tqxg" vj g" y grtct g' qh' hkuj gto gp0'"

Keywords: PPN Kejawanan, economic, coastal communities

Pendahuluan

Secara normatif, seharusnya masyarakat pesisir merupakan masyarakat yang sejahtera karena potensi sumber daya alamnya yang besar. Namun pada kenyataannya hingga saat ini sebagian besar masyarakat pesisir masih merupakan bagian dari masyarakat yang tertinggal dibandingkan dengan kelompok masyarakat lainnya. Kemiskinan yang melanda rumah tangga masyarakat pesisir / nelayan telah mempersulit mereka dalam membentuk kehidupan generasi berikutnya yang lebih baik dari keadaan mereka saat ini.

Wilayah pesisir merupakan pintu masuk perkembangan sosial budaya dan ekonomi masyarakat Indonesia sejak jaman dulu menjadi jalan masuk transportasi dan transformasi sosiologis serta budaya masyarakat. Selain faktor sosiologis tersebut, di wilayah pesisir inilah pada mulanya terjadi transaksi dan memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat potensial baik bagi masyarakat pesisir itu sendiri maupun perekonomian secara nasional.¹

Masalah pembangunan pantura khususnya yang berkaitan dengan bidang ekonomi adalah pertumbuhan investasi belum mampu meningkatkan keterkaitan dengan usaha ekonomi lokal dan kesempatan kerja. Beberapa kendala dalam upaya peningkatan investasi antara lain belum efisien dan efektifnya birokrasi, belum adanya kepastian hukum dan kepastian berusaha serta jaminan keamanan berusaha dalam bidang penanaman modal dan masih rendahnya infrastruktur pendukung. Potensi budaya dan keindahan alam belum digali dan dikembangkan secara optimal sebagai potensi wisata². Selain itu pembangunan industri pengolahan hasil

tangkap atau budi daya perairan, dan industry pariwisata bahari, kurang melibatkan partisipasi masyarakat pesisir itu sendiri.

Kota Cirebon merupakan salah satu daerah yang terletak pada jalur pantura yang memiliki potensi dengan wilayah pantai/pesisir. Bagi masyarakat Cirebon, sebelum tahun 2000, seperti daerah pantai Kejawanon merupakan pelabuhan dan terdapat Tempat Pelelangan Ikan (TPI) bagi para nelayan, juga sebagai tempat memancing bagi masyarakat Cirebon. Kini, Kejawanon selain berfungsi sebagai (TPI) bagi para nelayan. Pantai Kejawanon juga merupakan tempat obyek wisata pantai, bahkan ada sebagian masyarakat yang percaya untuk dijadikan therapy dengan cara berendam di air laut yang mereka yakini bisa mengobati penyakit.

Sebetulnya pantai Kejawanon yang terletak di Kelurahan Pegambiran kecamatan Lemawungkuk ini memiliki pantai dengan warna pasir hitam dan bersih serta masih dibiarkan begitu saja dan belum ada tanda-tanda dikelola dengan cepat. Kondisi pantai yang seperti itu merupakan sebuah embrio yang bisa dijadikan obyek wisata andalan bagi pemerintah kota dan sebagai peluang usaha bagi para masyarakat sekitarnya, karena saat ini dari mulai tempat parkir, pedagang asongan sampai yang menyewakan peralatan renang pun mereka masih menginduk pada IPK (Ikatan Pemuda Kejawanon).³

Berkaitan dengan pengumpulan dan pemasaran hasil tangkap nelayan di pesisir pantai kejawanon, maka keberadaan PPN

¹Rokhmin Dahuri, *Cetak Biru Pembangunan Kelautan dan Perikanan* (2012).

²Rokhmin Dahuri, *Dukungan IPTEK untuk pembangunan Kelautan* (Bogor: RODA Bahari, 2012).

³*Nasib Pantai Kejawanon Yang Masih Terabaikan*, <http://www.fahmina.or.id/artikel-berita/berita/11117-nasib-pantai-kejawanon-yang-masih-terabaikan.html> (Diakses 20 Juli 2014).

⁴Buku Profil Kementerian Kelautan Dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanon Kota Cirebon.

Kejawanan (PPNK) merupakan hal vital, PPN kejawanan yang terletak di Kelurahan Lemah Wungkuk Kota Cirebon, tepatnya pada posisi 060-44'-14" LS/1080-34'-53" BT, dilengkapi dengan berbagai sarana seperti sarana pokok, sarana fungsional dan sarana tambahan/penunjang. PPN Kejawanan yang berada di bagian Timur Jawa Barat, secara geografis sangat strategis karena merupakan pintu gerbang Jawa Barat bagian Timur dan dengan mudah menghubungkan daerah pemasaran potensial yaitu Bandung dan Jakarta sekaligus sebagai pintu gerbang keluar masuknya arus komoditi barang ekspor impor yang berfungsi sebagai pusat perdagangan dan industri serta wisatawan domestik maupun asing ke Jawa Barat khususnya Cirebon.⁴

Oleh karena itu, pelabuhan Cirebon diklasifikasikan sebagai pelabuhan Indonesia II, merupakan pelabuhan paling besar yang terletak di Jawa Barat. Pantai pelabuhan Kejawanan memiliki topografi pantai yang landai dan merupakan pantai dengan perairan tenang dan gelombang yang tidak terlalu besar. Arah angin dominan sepanjang tahun yang mempengaruhi pembentukan gelombang laut yang menuju ke arah pantai Teluk Cirebon. Ketinggian gelombang di laut Jawa umumnya disebabkan oleh angin biasanya mencapai lebih dari 2 meter dan merupakan gelombang laut dalam.

Peran PPN Kejawanan sesuai dengan beberapa fungsinya adalah melaksanakan pemasaran dan distribusi ikan, pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan, melaksanakan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan. Sementara masyarakat di sekitar PPNK terutama para nelayan sebagian besar belum merasakan dampak peran dari PPNK terutama kemudahan dalam menjual hasil tangkapan laut.

Rumusan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana gambaran kondisi ekonomi masyarakat pesisir pantai Kejawanan Kota Cirebon (2) Bagaimana Peran PPN dalam Pemberdayaan masyarakat ekonomi Pesisir Kejawanan? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kondisi Masyarakat Pesisir Kejawanan Kota Cirebon dan Peran PPN dalam Pemberdayaan masyarakat ekonomi Pesisir Kejawanan. Penelitian ini dilakukan agar hasilnya dapat berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu ekonomi; dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk penelitian berikutnya, dapat digunakan sebagai referensi dalam menyusun rencana dan kebijakan pembangunan ekonomi masyarakat pesisir, dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengelola program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menginvestigasi dan memahami fenomena seperti apa yang terjadi, mengapa terjadi dan bagaimana terjadinya, sekaligus memahami suatu situasi sosial, peristiwa, peran, interaksi dan kelompok. Dalam penelitian ini metode wawancara yang digunakan yaitu wawancara terbuka dan wawancara terstruktur. Pengumpulan Informasi melalui informan yaitu beberapa nelayan dan pemerintah. Selanjutnya dilakukan analisis, untuk menangkap, mencatat, menginterpretasikan dan menyajikan informasi.

Kajian Teori

Kajian teori dalam penelitian ini berkaitan dengan konsep masyarakat pesisir yaitu masyarakat yang tinggal dan hidup di wilayah pesisir, karena itu dari perspektif matapencahariannya, masyarakat pesisir

tersusun dari kelompok-kelompok masyarakat yang beragam, seperti nelayan, petambak, pedagang ikan, pemilik toko, serta pelaku industri kecil dan menengah pengolahan hasil tangkap. Keberagaman jenis pekerjaan penduduk di kawasan pesisir ini juga ditentukan oleh kondisi struktur sumber daya ekonomi lokal.⁵ Masyarakat pesisir bisa terdiri dari penjual jasa pariwisata, penjual jasa transportasi, serta kelompok lainnya yang memanfaatkan sumberdaya nonhayati laut dan pesisir untuk menyokong kehidupannya. Nelayan, pembudidaya ikan, dan pedagang merupakan kelompok masyarakat pesisir yang secara langsung mengusahakan dan memanfaatkan sumberdaya ikan melalui kegiatan penangkapan dan budidaya. Kelompok ini pula yang mendominasi pemukiman di wilayah pantai pada pulau-pulau besar dan kecil di Indonesia

Dari sisi usaha perikanan, kelompok masyarakat pesisir yang miskin terdiri dari rumah tangga perikanan yang menangkap ikan tanpa menggunakan perahu, menggunakan perahu tanpa motor, dan perahu bermotor tempel. Dengan skala usaha seperti ini, nelayan hanya mampu menangkap ikan di daerah dekat pantai. Dalam kasus tertentu, nelayan dapat bekerja sama atau bermitra dengan perusahaan besar, sehingga mereka dapat pergi menangkap ikan lebih jauh dari pantai. Namun demikian, peningkatan penghasilan dari hasil kerja sama ini tidak banyak berarti karena jumlah anggota rumah tangga yang besar menyebabkan jumlah penghasilan mereka belum mencukupi untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Konsep berikutnya yaitu pemberdayaan, merupakan upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif efisien secara

struktural, baik dalam kehidupan keluarga masyarakat, negara, regional maupun Internasional, termasuk dalam bidang politik ekonomi, maupun lainnya. Konsep pemberdayaan dapat dikatakan merupakan jawaban atas realitas ketidakberdayaan (*disempowerment*). Mereka yang tidak berdaya jelas adalah pihak yang tidak memiliki daya atau kehilangan daya. Mereka yang tidak berdaya adalah mereka yang kehilangan kekuatannya. Secara lebih lengkap suatu pemberdayaan memiliki maksud untuk:

1. Pemberdayaan bermakna kedalam, kepada masyarakat berarti suatu usaha untuk mentransformasikan kesadaran rakyat sekaligus mendekatkan masyarakat dengan akses untuk perbaikan kehidupan mereka.
2. Pemberdayaan bermakna keluar sebagai suatu upaya untuk menggerakkan perubahan kebijakan-kebijakan yang selama ini nyata-nyata merugikan masyarakat. Pemberdayaan dalam segi ini bermakna sebagai pengendali yang berbasis pada upaya memperlebar ruang partisipasi rakyat

Pemberdayaan merupakan suatu upaya yang harus diikuti dengan tetap memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh setiap masyarakat. dalam rangka itu pula diperlukan langkah-langkah yang lebih positif selain dari menciptakan iklim dan suasana. perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input) serta membuka akses kepada berbagai peluang (opportunities) yang nantinya dapat membuat masyarakat menjadi semakin berdaya.

Proses dan aktifitas pemberdayaan masyarakat pesisir harus didasarkan pada prinsip-prinsip pemikiran yang bisa menjadi landasan filosofi pemberdayaan. Filosofi pemberdayaan masyarakat pesisir dapat dieksplorasi melalui nilai-nilai yang mendasari hakikat hubungan antara (1) Manusia dan

⁵Rokhmin Dahuri, *Dukungan IPTEK*.

Allah Yang Maha Esa; (2) manusia dengan manusia, dan (3) manusia dengan alam.

Berdasarkan konsep pembangunan masyarakat yang menekankan pada pemberdayaan maka diformulasikan sasaran pemberdayaan masyarakat pesisir, khususnya nelayan dan petani ikan yang tinggal di kawasan pesisir pulau kecil dan besar, yang adalah sebagai berikut:⁶

1. Tersedianya dan terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang terdiri dari sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan.
2. Tersedianya prasarana dan sarana produksi secara lokal yang memungkinkan masyarakat dapat memperolehnya dengan harga murah dan kualitas yang baik.
3. Meningkatnya peran kelembagaan masyarakat sebagai wadah aksi kolektif (*collective action*) untuk mencapai tujuan-tujuan individu.
4. Terciptanya kegiatan-kegiatan ekonomi produktif di daerah yang memiliki ciri-ciri berbasis sumberdaya lokal (*resource-based*), memiliki pasar yang jelas (*market-based*), dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan kapasitas sumberdaya (*environmental-based*), dimiliki dan dilaksanakan serta berdampak bagi masyarakat lokal (*local society-based*), dan dengan menggunakan teknologi maju tepat guna yang berasal dari proses pengkajian dan penelitian (*scientific-based*).
5. Terciptanya hubungan transportasi dan komunikasi sebagai basis atau dasar hubungan ekonomi antar kawasan pesisir serta antara pesisir dan pedalaman.
6. Terwujudnya struktur ekonomi Indonesia yang berbasis pada kegiatan ekonomi di wilayah pesisir dan laut sebagai wujud pemanfaatan dan pendayagunaan sumberdaya alam laut.

⁶Rokhmin Dahuri, *Cetak Biru Pembangunan Kelautan dan Perikanan* (2012).

Asumsi dan prasangka negative terhadap kemampuan dan perilaku masyarakat pesisir harus dihindari oleh para konsultan pemberdayaan. Tugas mereka dalam pemberdayaan adalah menciptakan ruang kapabilitas agar masyarakat pesisir memiliki kemampuan untuk mengaktualisasikan diri dalam proses pembangunan local. Karena itu, pemberdaya masyarakat pesisir berkewajiban melakukan transfer ilmu secara dialogis, melatih, dan mengembangkan motivasi-motivasi kemajuan kepada masyarakat pesisir. Fungsi-fungsi pemberdaya sebagai mediator, fasilitator, dan motivator lebih dikedepankan daripada bertindak yang terkesan “menggurui” masyarakat pesisir. Dengan demikian, proses dan aktifitas pemberdayaan akan berakar pada pengetahuan dan pemahaman masyarakat.

Strategi pemberdayaan masyarakat pesisir dapat ditempuh dengan mengembangkan dua model beserta variasinya. Pertama, model pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis gender. Kedua, model pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis pranata budaya atau kelembagaan social. Kedua model juga bisa disinergikan. Pemberdayaan masyarakat pesisir yang berbasis kelembagaan akan berfungsi optimal untuk pengorganisasian warga dan pengelolaan kemampuan sumber daya social-ekonomi local, serta memanfaatkannya secara efektif dan efisien sehingga mempermudah pencapaian tujuan pemberdayaan.

Dengan memperhatikan berbagai persoalan social, ekonomi, dan lingkungan yang dihadapi oleh masyarakat pesisir, kebijakan pemberdayaan yang dilakukan terhadap mereka tetap penting dan relevan untuk mencapai tujuan pembangunan bangsa.

Akhirnya, pemberdayaan masyarakat pesisir diharapkan dapat memperkuat kapasitas dan otonomi mereka dalam mengelola potensi sumber daya pesisir, laut,

pulau-pulau kecil secara optimal dan berkelanjutan sebagai jalan untuk menjamin kelangsungan hidup mereka dan generasinya. Kesulitan-kesulitan ekonomi ini juga membatasi hak asasi penduduk miskin untuk memperoleh akses dan pelayanan pendidikan murah. Kegagalan pemerintah dalam memberikan jaminan social di bidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan yang layak sangat berpengaruh terhadap sumber daya manusia, produktifitas, dan daya saing bangsa Indonesia dalam menghadapi percuturan global.

Kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir sangat diperlukan, khususnya di desa-desa nelayan yang potensi sumber daya perikananannya cukup besar. Strategi pemberdayaan masyarakat pesisir yang efektif adalah berbasis kelompok dan berbingkai kelembagaan social atau pranata budaya yang sudah ada di dalam masyarakat. Kebijakan dan program pemberdayaan selama ini lebih banyak dipahami sebagai upaya menangani residu yang ditimbulkan oleh proses-proses pembangunan. Padahal, seharusnya isu pemberdayaan masyarakat sudah menyatu (included) di dalam kebijakan atau proses pembangunan yaitu pembangunan yang berkelanjutan yang merupakan weak sustainability cara-cara pembangunan yang lebih ramah lingkungan untuk meningkatkan standar kehidupan secara inklusif.⁷

Agar pelaksanaan kegiatan pemberdayaan social ekonomi masyarakat pesisir berjalan efektif dengan hasil yang maksimal, ia harus didasarkan pada basis pembentukan kelompok social dan dalam bingkai kelembagaan social atau pranata budaya yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat. Paradigma pembangunan orde baru yang terus terwariskan pada masa otonomi daerah adalah paradigm

pembangunan yang berorientasi pada kepentingan sektoral, top-down, dan memihak atau tunduk pada kepentingan pemillik capital (investor atau pihak swasta). Pembangunan pertambakan, industry pengolahan hasil tangkap atau budi daya perairan , dan industry pariwisata bahari, tidak banyak melibatkan partisipasi masyarakat pesisir, khususnya masyarakat nelayan.

Pemberdayaan masyarakat pesisir paling tidak memiliki dua dimensi pokok, yaitu dimensi kultural dan struktural. Dimensi kultural mencakup upaya-upaya perubahan perilaku ekonomi, orientasi pendidikan, sikap terhadap perkembangan teknologi, dan kebiasaan-kebiasaan. Sedangkan dimensi struktural mencakup upaya perbaikan struktur sosial sehingga memungkinkan terjadinya mobilitas vertikal nelayan. Perbaikan struktural tersebut umumnya berupa penguatan solidaritas nelayan untuk selanjutnya dapat berhimpun dalam suatu kelompok dan organisasi yang mampu memperjuangkan kepentingan mereka.

Dalam pemberdayaan nelayan secara struktural maupun kultural, perlu dipahami adanya keunikan karakteristik sosial nelayan yang tentunya menuntut adanya pendekatan pemberdayaan yang unik pula. Ada beberapa prinsip penting pemberdayaan yang digunakan untuk seluruh konteks komunitas nelayan, yaitu:

1. Prinsip Tujuan. Pemberdayaan harus dilandasi tujuan yang jelas, dimana nelayan harus dianggap sebagai subyek dalam pembangunan sehingga pendekatan yang dilakukan adalah membantu para nelayan agar dapat membantu dirinya sendiri dengan pendidikan dan pelatihan. Hal ini terdapat di dalam paradigma baru, yang asumsinya adalah nelayan memiliki

⁷Rokhmin Dahuri, *The Blue Future of Indonesia* (Bogor: RODA Bahari, 2013).

kemampuan untuk memecahkan masalah dirinya sendiri.

2. Prinsip pengetahuan dan penguatan nilai local. Pengetahuan modern saat ini seringkali dianggap segala-galanya dan ampuh untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi nelayan, padahal mereka memiliki sistem pengetahuan sendiri yang penting dijadikan bekal dalam pemberdayaan, karena pengetahuan tersebut sudah diwariskan turun-menurun. Begitu pula dengan nilai lokal yang potensial sebagai landasan dalam pemberdayaan. Nilai lokal itu dapat menjadi modal sosial yang penting untuk dikembangkan bagi kemajuan masyarakat nelayan.
3. Prinsip keberlanjutan. Berdasarkan realita yang terjadi, proyek-proyek pemberdayaan yang sering dilakukan kadangkala terjebak pada paradigma proyek yang mengharuskan tercapainya target secara nyata dalam waktu yang singkat. Dengan demikian, prinsip keberlanjutan seringkali diabaikan dalam proyek-proyek pemberdayaan selama ini dan hal tersebut terjadi karena masih kuatnya paradigma proyek dalam setiap aktivitas pemberdayaan. Inipun terjadi karena memang sifat proyek hanya sesaat dan tidak *multiyears*. Oleh karena itu, perlu dipikirkan perubahan sistem administrasi proyek yang terkait dengan program pemberdayaan agar program pemberdayaan dapat berjalan efektif tanpa batasan administrasi yang seringkali menghambat.
4. Prinsip ketepatan kelompok sasaran. Pihak pelaksana pemberdayaan seringkali mendatangi elite desa yang lebih mudah berkomunikasi meskipun sebenarnya jauh dari persoalan nelayan. Sementara itu, nelayan miskin yang tidak mudah berkomunikasi malah jarang didatangi.

Akibatnya, informasi yang diperoleh justru bias dengan kepentingan informan elite nelayan tersebut, sehingga banyak program pemberdayaan yang hanya menyentuh elite nelayan yang sebenarnya tidak perlu diberdayakan. Oleh karena itu, sudah saatnya pemberdayaan sosial nelayan saat ini berorientasi pada kelompok sasaran yang tepat.

5. Prinsip kesetaraan gender. Salah satu ciri sosial nelayan adalah kuatnya peran wanita atau istri nelayan dalam aktivitas ekonomi maupun pengambilan keputusan. Dalam posisi yang demikian, sasaran pemberdayaan harus mencakup istri-istri nelayan juga. Seringkali program pemberdayaan bias kepada laki-laki sehingga laki-laki yang selalu diajak berdiskusi dan memecahkan masalah tanpa melibatkan istri mereka.

Saat ini jumlah nelayan miskin tercatat 7,87 juta orang atau 25,14% dari jumlah penduduk miskin nasional (KKP, 2011). Banyak faktor yang menyebabkan mayoritas nelayan di Indonesia masih terlilit derita kemiskinan. Dalam tataran praktis, nelayan mengalami kemiskinan karena pendapatan (*income*) nya lebih kecil dari pada pengeluaran untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga dan dirinya dalam kurun waktu tertentu. Sejauh ini pendapatan nelayan, khususnya nelayan tradisional dan nelayan ABK dari kapal ikan komersial/modern (diatas 30 GT), pada umumnya kecil (kurang dari Rp 1 juta per bulan) dan sangat fluktuatif alias tidak menentu. Adanya kondisi cuaca buruk yang terjadi akhir-akhir ini di beberapa titik perairan seperti gelombang tinggi mengakibatkan nelayan tidak dapat melakukan aktifitas melaut sehingga menambah penderitaan nelayan.⁸

⁸Buku Profil Kementerian Kelautan Dan Perikanan Direktorat Jendral Perikanan Tangkap

Intensitas melaut nelayan tradisional yang sangat dipengaruhi oleh cuaca menyebabkan mereka sering merugi akibat perubahan cuaca yang tidak menentu. Saat musim barat, gelombang laut bisa mencapai 3-5 meter, hujan disertai angin kencang (badai) terjadi setiap waktu. Fenomena ini menjadi penyebab kerusakan lambung perahu bahkan karam saat melaut. Perjuangan nelayan tradisional tidak sampai disitu, jarang melaut memaksa hasil tangkapan minim, berdampak pada sepi tempat pelelangan ikan yang biasanya ramai karena ikan yang diperdagangkan sedikit dan berujung pada hutang atau menganggur.

Beranjak dari permasalahan nelayan yang tidak sedang melaut akibat kondisi cuaca buruk, maka harus ada solusi untuk saat ini dan jangka panjang. Untuk bantuan jangka pendek, pemerintah bisa memberi bantuan dengan memberdayakan nelayan, karena itu agar pembangunan perikanan tangkap berhasil maka saatnya kita mengelola pembangunan perikanan tangkap dengan melibatkan masyarakat, nelayan dan stakeholders lainnya sejak tahap perencanaan sampai implementasi dan pengendalian (*co-management* atau *stakeholder participation*).⁹

Selain itu untuk meningkatkan kualitas SDM nelayan nasional agar kompetitif maka pemberdayaan nelayan juga dapat dilakukan dengan memberikan penyadaran, pendidikan, pendampingan, pelatihan keterampilan dan penyuluhan tentang teknik penangkapan ikan, manajemen keuangan, manajemen lingkungan hidup dan etos kerja termasuk *achievement and motivation* secara berkesinambungan. Misalnya mendidik dan

melatih para nelayan kita, agar punya keterampilan dan etas kerja seperti nelayan Jepang, Thailand dan RRC yang mampu melaut lebih dari tiga bulan.

Di sisi lain kebanyakan nelayan kita saat ini maunya hanya sehari di laut (*one day fishing*). Para nelayan Indonesia yang terampil dengan kemampuan teknis dan etas kerja tinggi kini kebanyakan kerja di kapal-kapal ikan asing. Kita harus memperkerjakan saudara-saudara kita nelayan terampil ini di kapal-kapal ikan nasional.

Kemudian, untuk bantuan jangka panjang harus ada fasilitas bantuan dari pemerintah yang lebih mendaya-gunakan nelayan. Misalnya, langkah menciptakan alternatif mata pencarian lapangan kerja seperti budidaya rumput laut, budidaya kepiting asoka, industri pengolahan hasil, laut, dan sebagainya.

Apabila nelayan diberikan alternatif pekerjaan, contohnya budidaya rumput laut maka dengan mengembangkan 200.000 ha tambak (18% potensi) untuk *Gracilaria*, maka tiap tahun dapat dihasilkan 4 juta ton rumput laut kering yang setara dengan USD 2 miliar, pendapatan petambak Rp 3 juta per ha per bulan, dan lapangan kerja tercipta sejuta orang. Bila 1 juta ha perairan laut (4% potensi) dikembangkan untuk budidaya *Eucheuma* spp, maka dalam setahun dapat diproduksi 20 juta rumput laut kering yang nilainya USD 20 miliar, pendapatan pembudi daya Rp 12 juta per ha per bulan, dan tenaga kerja yang terserap 4 juta orang.¹⁰

Dengan demikian bila menerapkan solusi pendekatan pemecahan masalah seperti diatas, insya Allah para nelayan kita akan lebih semangat dan senang di saat tidak sedang melaut disebabkan pendapatan dapat diperoleh dari alternatif pekerjaan yang lain. Inilah fondasi dari kejayaan dan kesejahteraan sub-sektor perikanan tangkap

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan Kota Cirebon

⁹Rokhmin Dahuri, *Cetak Biru Pembangunan*.

¹⁰Rokhmin Dahuri, *Cetak Biru Pembangunan*.

nasional. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai dan memberkahi upaya kita bersama untuk mensejahterakan seluruh nelayan Indonesia, dan menjadikan sub-sektor perikanan tangkap sebagai pilar kemajuan dan kemakmuran bangsa tercinta ini.

Beranjak dari anatomi permasalahan kemiskinan nelayan di atas, maka kebijakan, strategi, dan program untuk memerangi kemiskinan nelayan dan sekaligus mensejahterakannya haruslah bersifat komprehensif, terpadu, dan sistemik serta dikerjakan secara berkesinambungan. Tidak bisa dilakukan dengan pendekatan proyek seperti yang kini dilakukan, dengan membagi-bagi kapal ikan kepada nelayan, tanpa mempersiapkan kapasitas mereka, dan tanpa memperhatikan keseimbangan antara ketersediaan stok ikan dan upaya tangkap. Cara-cara semacam ini hanya membuat mental nelayan rusak, yakni membuat mereka manja dan hanya mau menjadi 'tangan di bawah', bukan 'tangan di atas'.¹¹

Faktanya, sekarang banyak kapal bantuan itu tidak bisa dimanfaatkan oleh nelayan secara optimal. Salah sasaran, karena si penerima biasanya konstituen dari partai si pemberi. bantuan. Oleh karena itu, mulai sekarang kita perlu menerapkan grand design manajemen pembangunan perikanan tangkap yang tepat, benar dan berkelanjutan. Sehingga, ia mampu menjaga kelestarian stok SDI, meningkatkan kesejahteraan nelayan, dan meningkatkan kontribusi sub-sektor perikanan tangkap bagi pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bangsa secara berkelanjutan.

Untuk pertama yang harus dilakukan adalah menata ulang dan memastikan, bahwa jumlah upaya tangkap dan laju penangkapan di suatu wilayah perairan laut (WPP) wilayah

laut yang menjadi kewenangan pengelolaan pemerintah kabupaten kota atau provinsi) tidak boleh melebihi 80% MSY SDI. Atau, untuk wilayah-wilayah yang padat penduduk dan tinggi angka penganggurannya, bisa sampai sama dengan MSY SDI.

Selanjutnya, jumlah kapal ikan yang beroperasi di setiap wilayah perairan laut itu ditetapkan dengan cara; membagi nilai MSY atau 80% MSY dengan *catchability* (kapasitas menangkap) kapal ikan. Jenis dan ukuran kapal ikan beserta alat tangkapnya mesti yang efisien dan ramah lingkungan, sehingga memungkinkan bagi nelayan ABK mendapatkan income yang mensejahterakan, yakni rata-rata Rp 2.550.000 per nelayan per bulan. Dengan income sebesar itu, nilai total MSY sebesar 6,52 juta ton/ tahun, dan rata-rata harga ikan yang berlaku sekarang, maka jumlah nelayan Indonesia seharusnya sekitar 1,9 juta orang saja. Karena jumlah nelayan laut sekarang sekitar 2,3 juta orang, maka secara bertahap sisanya yang 400.000 orang harus dialihkan ke mata pencaharian (usaha) lain seperti budidaya laut (*mariculture*), budidaya tambak, budidaya di perairan air tawar, budidaya dalam akuarium, budidaya garam, industri pengolahan hasil perikanan, industri bioteknologi kelautan, industri mesin dan peralatan perikanan, industri galangan kapal, dan industri serta jasa penunjang perikanan lainnya, yang peluang pengembangannya masih terbuka lebar. Segenap usaha alternatif ini dapat juga dijadikan sebagai matapen- caharian bagi nelayan pada saat musim paceklik.

Mengingat sebaran armada kapal ikan nasional sangat tidak merata, maka wilayah-wilayah perairan laut yang dekat dengan konsentrasi pemukiman penduduk, seperti Selat Malaka, Pantura, Selat Bali, dan Pantai Selatan dan Barat Sulawesi,

¹¹Rokhmin Dahuri, *Cetak Biru Pembangunan*.

dipadati dengan kapal-kapal ikan, sehingga mengakibatkan overfishing. Sementara itu, ada beberapa wilayah perairan laut yang status pemanfaatan SDI nya masih *underfishing*, dan ada wilayah perairan laut Indonesia yang SDI dipanen secara ilegal oleh armada kapal ikan saing seperti yang telah disebutkan diatas. Oleh karena itu, jumlah upaya tangkap (kapal ikan) di wilayah-wilayah laut yang overfishing harus dikurangi sampai mencapai nilai MSY. Dan, kelebihan kapal ikan dari wilayah overfishing dapat dipindahkan ke wilayah yang underfishing (relokasi kapal ikan dan nelayan). Dengan demikian, kita akan mendapatkan keuntungan ganda. Di satu sisi kita memanfaatkan SDI di wilayah laut underfishing yang selama ini dicuri oleh nelayan asing dan mengembangkan ekonomi wilayah di luar Jawa. Di sisi lain, kita memberi kesempatan bagi SDI di wilayah-wilayah laut yang overfishing untuk pulih kembali.¹²

Program Bantuan kapal ikan untuk nelayan harus belajar dari kejadian terdahulu dimana KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) telah dua kali melakukan kekeliruan dalam memberikan bantuan kapal ikan kepada nelayan. Yang pertama terjadi ketika KKP memberikan bantuan kapal ikan kepada para nelayan korban tsunami di Pangandaran dan Cilacap pada tahun anggaran 2006 - 2007. Kesalahan bukan hanya berupa spesifikasi kapal ikan yang tidak sesuai dengan kondisi oseanografis perairan laut di sekitar Pangandaran dan Cilacap atau keinginan (kebutuhan dan aspirasi) nelayan, tetapi juga pada penggelembungan (mark-up) harga kapal, alias korupsi. Akibatnya sangat fatal, bukan hanya sejumlah kapal ikan itu tidak bermanfaat bagi nelayan, tetapi juga membuat Kepala Dinas Kelautan dan

Perikanan Provinsi Jawa Tengah beserta seorang stafnya, dua staf Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, dan seorang pengusaha yang dapat kontrak proyek ini dipenjarakan oleh KPK.

Selanjutnya program bantuan kapal ikan berukuran 30 GT dari KKP kepada nelayan membuat 'gaduh' bukan hanya kalangan kelautan dan perikanan, tetapi juga perpolitikan nasional. Bagaimana tidak, hampir semua media cetak dan elektronik memberitakan soal program ini. Bahkan, Kompas sebuah harian yang dinilai paling kredibel dan objektif menurunkan berita heboh program bantuan kapal ikan ini selama delapan hari berturut-turut menjelang Resfuffle Kabinet 20 Oktober 2011.

Dari pemberitaan berbagai media masa dan pantuan penulis sendiri di berbagai daerah, sejumlah penyimpangan yang membuat 'gaduh' program ini dapat disarikan sebagai berikut: (1) kapal ikan tidak dilengkapi dengan alat penangkap ikan atau alat kelengkapannya, (2) kapal ikan belum memiliki surat izin operasi, (3) ukuran atau bentuk kapal ikan tidak sesuai dengan kondisi oseanografis daerah penangkapan ikan (fishing grounds), (4) penerima bantuan bukanlah orang atau kelompok yang tepat, seperti bukan nelayan, dan (5) adanya indikasi praktik koruptif. Atas dasar berbagai penyimpangan tersebut, banyak pihak mendesak pemerintah untuk menghentikan sementara program bantuan kapal ikan ini.

Sebenarnya tujuan dari program bantuan kapal nelayan ini sangat baik, yakni untuk peningkatan kesejahteraan nelayan tradisional. Sebagaimana diungkapkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap - KKP bahwa program ini berupa 1.000 kapal ikan berukuran 30 GT dengan total anggaran (dari APBN) sebesar Rp 1,5 triliun yang akan dibagikan kepada : nelayan

¹²Rokhmin Dahuri, *Cetak Biru Pembangunan*.

tradisional secara cuma-cuma dalam kurun waktu dari 2010 hingga 2014. Jadi, harga dari satu unit kapal ikan sebesar Rp 1,5 miliar termasuk untuk kasko, mesin penggerak dan perlengkapan, alat penangkapan dan alat bantu penangkapan ikan, serta peralatan dan perlengkapan kapal. Dana sebesar Rp 1,5 miliar itu juga mencakup untuk biaya operasional awal kapal, pengurusan surat-surat kapal dan perizinan, dan biaya administrasi (Kompas, 13/10/2011 halaman 19). Sayangnya, banyak dari spesifikasi tersebut yang tidak terpenuhi ketika kapal ikan diberikan kepada penerima bantuan. Pada 2010, dari target bantuan 60 unit kapal ikan, baru teralisir 46 unit dan 7 unit kapal diantaranya sampai sekarang tidak beroperasi.

Agar niat baik dari pemerintah ini terwujud menjadi kenyataan yang indah, yakni nelayan yang menerima bantuan menjadi sejahtera, dan pada saat yang sama membuat sub-sektor perikanan tangkap lebih efisien dan berkelanjutan (sustainable), maka diperlukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut.

Pertama, mengingat sebagian besar jenis stok ikan di perairan Laut Jawa telah mengalami jenuh tangkap (*fully exploited*). atau kelebihan tangkap (*overfishing*). Sementara, SDI (sumberdaya ikan) di wilayah perairan perbatasan, ZEEI, dan laut dalam banyak yang belum dimanfaatkan secara optimal oleh nelayan kita, tetapi justru banyak 'dicuri' oleh armada kapal ikan asing sejak awal 1980-an. Maka, bantuan kapal ikan dialokasikan untuk menangkap ikan di wilayah-wilayah perairan laut yang masih underfishing itu. Contohnya di Laut Natuna, ZEEI Laut China Selatan, ZEEI Samudera Hindia, Laut Sulawesi, ZEEI Samudera Pasifik, Laut Banda, dan Laut Arafura. Ukuran dan jenis (bentuk) kapal

serta alat tangkap ikan nya pun mesti disesuaikan dengan kondisi oseanografis dan jenis ikan yang menjadi target penangkapan.

Supaya produktif dan efisien (menguntungkan) secara berkelanjutan, pola usaha sebaiknya berbasis kemitraan antara nelayan penerima bantuan sebagai pemilik kapal yang akan mengoperasikan kapal dengan pihak swasta atau BUMN perikanan. Swasta atau BUMN perikanan bertanggung jawab atas dana operasional, bimbingan teknis penangkapan dan penanganan ikan hasil tangkap yang baik, pemasaran produk, dan manajemen. Dengan pola ini, nelayan penerima bantuan sebagai pemegang saham (yang besarnya harus dimusyawarahkan dengan BUMN atau swasta dengan mediator KKP) selain menerima pendapatan sebagai nahkoda kapal, fishing master atau ABK, mereka juga akan mendapatkan deviden (pembagian keuntungan) setiap tahun atau setiap bulan.

Adapun nelayan penerima bantuan untuk setiap kapal, sebaiknya terdiri dari nelayan berasal dari Pantura atau daerah yang telah overfishing lainnya dan nelayan dari daerah yang berdekatan dengan fishing grounds yang masih underfishing. Misalnya dari Provinsi Aceh, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, NTT, NTB, dan Papua.

Dengan demikian, selain nelayan penerima bantuan akan sejahtera. Gejala overfishing di Laut Jawa dan wilayah perairan lainnya akan bisa pulih, dan secara simultan dapat mengembangkan serta memakmurkan wilayah luar Jawa dengan basis ekonomi perikanan tangkap. Selain itu, kita pun akan mampu membrantas praktik pencurian ikan (*illegal fishing*) yang selama dilakukan oleh para nelayan asing di wilayah-wilayah laut yang belum

dimanfaatkan oleh nelayan Indoensia secara optimal. Jika kita memberi bantuan kapal ikan kepada nelayan Pantura untuk menangkap ikan di fishing grounds Laut Jawa atau di wilayah laut lain yang telah overfishin seperti yang dilakukan oleh KKP pada 2010, sama saja dengan menghancurkan SDI di wilayah perairan *overfishing* dan membuat nelayan semakin miskin.

Kedua, perlu membangun pelabuhan perikanan sebagai kawasan industri perikanan terpadu di daerah-daerah luar Jawa yang akan dijadikan lokasi pendaratan ikan dari armada kapal ikan modern bantuan pemerintah ini.

Ketiga, nelayan atau KUB nelayan yang akan menerima bantuan, baik yang berasal dari daerah overfishing maupun dari daerah underfishing harus disiapkan secara seksama tentang aspek keterampilan (skills) penangkapan ikan dan penanganan hasil tangkap, manajemen keuangan, dan etos kerja (akhlak).

Keempat, seluruh aparat pemerintah dan DPR dari pusat hingga ke daerah jangan menjadikan program mulia ini untuk kepentingan pribadi atau politik. Cukup sudah (*enough is enough*) menyalahgunakan dana APBN untuk kekayaan atau popularitas pribadi. Sejahterakan nelayan dan majukan negara-bangsa tercinta ini melalui program ini.

Kajian Literatur Terdahulu

Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (Pemp) Di Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis apakah implementasi program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di pengaruhi oleh tingkat komunikasi, kemampuan kerja pelaksana program dan sikap kerja pelaksana

program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis minor dan mayor yang diajukan diterima.¹³

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Karangsong sebelum dan setelah pelaksanaan program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) dan relokasi program PEMP dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Karangsong. Metode analisis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis statistik deskriptif dengan data kualitatif. Penelitian ini di khususkan pada masyarakat pesisir yang menerima bantuan dana ekonomi produktif yang dalam hal ini adalah masyarakat Desa Karangsong Kabupaten Indramayu. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan *total sampling*, sehingga ditemukan responden berjumlah 35 orang yang kesemuanya itu adalah masyarakat yang mendapatkan bantuan dana dari program PEMP.

Dari hasil penelitian di lapangan di dapatkan bahwa masyarakat Desa Karangsong mengalami peningkatan dalam kesejahteraannya. Bentuk dari pada peningkatan kesejahteraan tersebut adalah adanya kenaikan pendapatan, kesehatan keluarga yang lebih baik, dan adanya investasi / tabungan dalam keluarga. Peningkatan kesejahteraan tersebut adalah dampak daripada penerapan program PEMP di Desa Karangsong dengan pemberian bantuan dana ekonomi produktif, pelatihan manajemen usaha dan pembangunan

¹³Lestari Mohamad, *Studi Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Di Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang* (2000).

infrastruktur (sarana dan prasarana kenelayanan).¹⁴

Potret Masyarakat Pesisir di sekitar PPN Kejawanan

Pantai Kejawanan Cirebon merupakan salah satu dari pantai yang berada di wilayah Cirebon, Jawa Barat, Indonesia. Pantai Kejawanan Cirebon merupakan tempat Wisata Pantai, tempat pengelolaan ikan (TPI Kejawanan) dan Wisata Terapi. Berlokasi di Jln. Yos Sudarso Kota Cirebon ini terletak dekat dengan Pelabuhan Cirebon dan Ade Irma Traffic Garden Cirebon. Tarif masuknya pun hanya dua rupiah saja, bagi para pengguna kendaraan, baik mobil pribadi maupun sepeda motor, sedangkan untuk para pejalan kaki tidak dipungut tarif masuk.

Pantai Kejawanan merupakan salah satu potensi wisata yang dimiliki oleh kota Cirebon, meskipun keberadaannya kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah, kondisi pantai yang kurang terawat, dengan separuh view yang tertutup sebuah restoran sea food, mengurangi keindahan Pantai Kejawanan, namun walaupun begitu, rasa haus masyarakat akan obyek wisata alam, menjadikan Pantai Kejawanan selalu ramai dikunjungi pada hari-hari libur.

Di Pantai Kejawanan selain kita bisa menikmati terbitnya matahari dengan posisi yang bagus, yaitu tepat ditengah-tengah pantai. Di sana juga kita bisa berwisata keliling pantai dengan menggunakan perahu motor milik nelayan, dengan tarif yang cukup murah yaitu seharga lima ribu Rupiah saja per orang, yang bahkan bisa di tawar hingga sebesar tiga ribu rupiah saja. Selain itu, disana juga banyak disewakan perahu karet dengan tarif mulai seharga lima ribu Rupiah hingga

sepuluh ribu Rupiah per perahu setiap satu jamnya, saat libur lebaran/jika sedang beruntung kita bisa melihat kapal nelayan/kapal tunda karena letaknya dekat dengan Pelabuhan Cirebon dan kita bisa berfoto di atas perahu dan melihat nelayan membawa hasil laut.¹⁵

Menurut masyarakat sekitar, Pantai Kejawanan dapat mengobati penyakit. Selain tempat rekreasi, konon pantai Kejawanan ini digunakan sebagai tempat pengobatan berbagai macam penyakit, karena air pantai kejawanan ini diyakini dapat menyembuhkan penyakit seperti reumatik, asam urat, diabetes, stroke, radang tenggorokan, penyakit kulit dan batuk yaitu dengan cara berendam di dalam air atau berkumur-kumur. Pengunjung percaya air di pantai Kejawanan memiliki manfaat untuk menyembuhkan orang sakit mulai penyakit kusta, penyakit kulit serta kelumpuhan.

Sejumlah perahu berukuran kecil, milik para nelayan di Kampung Pesisir Kota Cirebon (Suara Gratia) Cirebon-Kota Cirebon daerah yang terletak di Pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat, memiliki panjang pantai mencapai 7 Km. Tentu hal ini memberikan keuntungan tersendiri, yakni melimpahnya hasil laut. Hasil laut yang melimpah menghasilkan ikan sebanyak 30.000 ton per tahun, idealnya merupakan sandaran hidup yang mumpuni bagi warga yang tinggal di pesisir pantai Kota Cirebon. Kampung nelayan yang tersebar di 4 titik (Kampung Samadikun, Pesisir, Cangkol, dan Kejawanan) berlomba dengan cuaca, fluktuasi harga ikan di pasaran, kenaikan harga BBM, dan biaya operasional lainnya, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nelayan-nelayan ini terbagi menjadi 2

¹⁴Fathul Amri, *Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karangsong Indramayu* (2002).

¹⁵Nasib Pantai Kejawanan Yang Masih Terabaikan, <http://www.fahmina.or.id/artikel-berita/berita/1117-nasib-pantai-kejawanan-yang-masih-terabaikan.html> (Diakses 20 Juli 2014).

kelompok yakni, nelayan besar bagi mereka yang menggunakan kapal-kapal penangkap ikan berukuran besar dan mampu menempuh jarak lebih jauh, serta kelompok nelayan kecil untuk nelayan yang menggunakan perahu penangkap ikan berukuran lebih kecil, hanya mampu menempuh jarak tertentu saja dalam melaut.

Masyarakat nelayan sepanjang daerah samadikun, pesisir, cangkol sampai kejawanan. Gambaran masyarakat nelayan bahwa rata-rata nelayan sekitar samadikun melaut dari jam 4 sore sampai subuh atau pagi hari baru pulang. Ketika melaut tentunya para nelayan memperhatikan kondisi cuaca dan besarnya angin, karena jika angin besar para nelayan samadikun tidak mau melaut. Kemudian menurut beliau, ketika hasil laut sepi kebanyakan nelayan samadikun beralih profesi ada yang menjadi tukang bangunan, buruh pabrik, tukang becak, dan lainnya yang penting bisa mengisi kekosongan ketika hasil lau sedang sepi. TPI (tempat pelelangan ikan) dan KUD (koperasi unit desa) di nelayan samadikun sebenarnya sudah ada, namun karena pengelolaan manajemen yang kurang akhirnya TPI dan KUD pun tidak bisa beroperasi dengan baik dan bahkan kini TPI dan KUD nelayan samadikun sudah tidak ada.

Sementara nelayan daerah pesisir yang bernama bapa Kadir, usianya 49 tahun, ia merupakan warga asli pribumi Pesisir kota Cirebon, ia menjadi nelayan sekitar 40 tahun. Menurut bapa Kadir rata-rata nelayan Pesisir melaut dari jam 11 siang sampai sore. Ketika melaut tentunya para nelayan memperhatikan kondisi cuaca dan besarnya angin, karena jika angin besar para nelayan tidak mau melaut.

Alat yang digunakan nelayan pesisir biasanya menggunakan jaring Gilnet dan jaring kantong (tripel gilnet). Melaut dengan menggunakan jaring ini biasanya menghabiskan solar sebanyak 5-10 liter. Jika sedang panen nelayan bisa memperoleh

sampai 80 kg ikan, tapi jika sedang paceklik ya terkadang tidak mendapat apa-apa. Ikan yang didapat biasanya ikan blanak, ikan kembung, dan ikan kuro. Penghasilan yang diperoleh jika di rata-rata kan memperoleh Rp. 60.000. Kemudian menurut beliau, ketika hasil laut sepi kebanyakan nelayan Pesisir beralih profesi ada yang menjadi tukang bangunan, buruh pabrik, tukang becak, mencari batu bara dan lainnya yang penting bisa mengisi kekosongan ketika hasil lau sedang sepi. TPI (tempat pelelangan ikan) dan KUD (koperasi unit desa) di nelayan pesisir sebenarnya sudah ada, namun karena pengelolaan manajemen yang kurang akhirnya TPI dan KUD pun tidak bisa beroperasi dengan baik dan bahkan kini TPI dan KUD nelayan pesisir sudah tidak ada.

Lain lagi dengan nelayan daerah Cangkol, wawancara dilakukan pada tanggal 24 juli 2014 dengan salah satu nelayan Cangkol yang bernama bapa Suparman, usianya 49 tahun, ia merupakan warga asli pribumi Cangkol kota Cirebon, ia menjadi nelayan sekitar 40 tahun. Menurut bapa Suparman rata-rata nelayan Cangkol melaut dari jam 6 pagi sampai jam 1 siang solar yang dibutuhkan sekitar 10 liter, adapula yang berangkat jam 3 malam sampai jam 12 siang solar yang dibutuhkan sekitar 30 liter. Ketika melaut tentunya para nelayan memperhatikan kondisi cuaca dan besarnya angin, karena jika angin besar para nelayan tidak mau melaut.

Menurut Bapak Suparman, nelayan Cangkol merupakan nelayan percontohan, karena nelayan cangkol mampu membuat rumpon (rumah ikan). Hal ini yang belum dimiliki oleh nelayan yang lainnya, mungkin karena kurangnya pengawasan dan perhatian. Disini juga ada wisata bahari bagi para pengunjung, maksudnya adalah bahwa para pengunjung bisa memancing di tengah laut dengan menyewa kapal nelayan cangkol.

Dalam hal ini pengunjung di kenakan biaya sebesar Rp. 750.000 untuk 5 orang.

Jadi bisa dibilang nelayan cangkol lebih maju dibandingkan nelayan lainnya, disini juga terdapat TPI yang masih Aktif, dan ada KUB kakap merah dan KUB Jenaha. Artinya bahwa dalam segi pengelolaan nelayan cangkol lebih produktif dan lebih baik sehingga perkumpulan nelayan yang ada selalu berkembang.

Pada umumnya ikan hasil tangkapan nelayan dipasok pada TPI untuk dilelang kepada pihak pembeli. Hal tersebut juga telah diatur di dalam ketentuan pada Peraturan Daerah no. 5 tahun 2005 pasal 3 yang mengharuskan setiap komoditas perikanan laut bernilai ekonomis hasil tangkapan nelayan yang akan dipasarkan kepada pedagang maupun industri dilelang di tempat pelelangan ikan (TPI), kecuali komoditas perikanan yang digunakan oleh konsumen akhir yang memanfaatkan ikan langsung untuk dikonsumsi. Pihak pengelola TPI yang berbadan usaha koperasi mengatur mekanisme pelelangan ikan yang dipasok dari nelayan.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPC HNSI) Kota Cirebon Karsudin mengatakan, hidup para nelayan di Kota Cirebon dalam keadaan memprihatinkan, karena dalam sekali melaut pendapatan mereka tidak sebanding dengan pengeluaran untuk solar, makan/minum, dan logistik lainnya. "Memang nelayan saat ini boleh dibilang hidup dalam keprihatinan, dalam sekali melaut mereka mendapatkan uang rata-rata kurang dari Rp 100.000 setelah dipotong biaya logistik." Menurut pengamatan kami di lapangan, kehidupan para nelayan ini memang jauh dari kata sejahtera, terlihat dari tempat tinggal mereka yang saling berhimpitan satu dengan lainnya. Pemukiman nelayan terlihat kumuh, sampah-sampah

berserakan di jalan dan gang-gang sempit perumahan, saluran air yang kotor hingga mengeluarkan aroma tidak sedap.

Ia melanjutkan, untuk nelayan besar yang memiliki kapal-kapal penangkap ikan berukuran lebih besar, tidak menjadi masalah karena mereka bisa mencari ikan hingga ke tengah laut. Sedangkan untuk nelayan kecil, mereka tidak bisa mencari ikan lebih jauh, belum lagi dihadapkan pada berkurangnya jumlah ikan di perairan dangkal karena pencemaran lingkungan. Karsudin menjelaskan, Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang ada belum berfungsi maksimal karena para nelayan masih ada yang menjual hasil tangkapannya ke tengkulak. Sehingga harga ikan di pasaran tidak bersahabat dengan nelayan. "Saya berharap kepada pemerintah pusat, provinsi maupun daerah, memiliki program-program yang berpihak pada nasib nelayan." Tutupnya.¹⁶

Menurut Dedi Supriadi, Kepala bagian seksi perikanan mengatakan, nelayan yang berada di pantai Kota Cirebon dibagi menjadi dua, yaitu nelayan yang menggunakan kapal kecil dan nelayan yang menggunakan kapal besar. Nelayan yang menggunakan kapal kecil terdiri dari nelayan samadikun, pesisir, dan cangkol. Sedangkan nelayan kapal besar terdiri dari nelayan kejawan.

Untuk nelayan ukuran kapal kecil, sekali melaut biasanya membutuhkan waktu kurang lebih 5-10 jam, karena biasanya para nelayan kapal kecil ada yang berangkat subuh pulang sore, ada pula yang berangkat sore pulang subuh. Dan kebutuhan solar yang dibutuhkan dalam sekali melaut biasanya \pm 10 liter solar. Sedangkan nelayan kapal besar yang berda di kejawan sekali melaut biasanya membutuhkan waktu \pm 4 bulan,

¹⁶*Nelayan Cirebon Hidup Dalam Kondisi Keprihatinan*, <http://suaragrati.afm.wordpress.com/2012/11/23/nelayan-cirebon-hidup-dalam-keprihatinan/> (Diakses 20 juli 2014).

dalam sekali melautpun membutuhkan bahan bakar solar sekitar 20.000 liter.

Nelayan dengan menggunakan kapal besar, biasanya sekali melaut ada yang 2 bulan, 3 bulan, bahkan sampai 4 bulan atau sesuai dengan kebutuhannya. Dalam sekali melaut nelayan kapal besar mampu menghasilkan ikan sekitar 8 sampai 12 ton. Jenis ikan yang didapat antara lain cumi-cumi, tengiri, dan kakap. Upah yang ia peroleh sebagai buruh nelayan per hari sebesar Rp. 20.000, jika dalam sebulan ia mendapatkan Rp. 600.000, jika hasil laut melimpah maka ia akan mendapatkan tambahan sebesar Rp. 4.500 per pancing.

Peran PPN Kejawanan dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Pembangunan PPN Kejawanan Cirebon¹⁷ dirintis pada tahun 1976 tetapi baru intensif pelaksanaannya mulai tahun anggaran 1994/1995. Pembangunannya dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan anggaran yang tersedia, di mana sumber anggaran berasal dari APBN, APBD, ZEEI dan OECF. Dalam pelaksanaan pembangunannya diprioritaskan pada fasilitas pokok seperti penahan gelombang, dermaga, kolam dan alur pelayaran, rambu navigasi, jalan masuk dan jalan komplek, TPI dan lain – lainya. Setelah melalui 3 tahun anggaran yaitu tahun anggaran 1994/1995, 1995/1996 dan 1996/1997 PPN Kejawanan pada bulan Mei 1997 dioperasionalkan dengan status Uji Coba yang diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat Bapak R. Nuryana, walaupun dengan fasilitas yang masih minim.

PPN Kejawanan Cirebon mempunyai tujuan antara lain untuk meningkatkan taraf

hidup dan kesejahteraan nelayan/petani ikan. Salah satu untuk menciptakan kondisi tersebut, PPN Kejawanan telah bekerja sama dengan beberapa investor swasta yang bergerak dibidang perikanan, tahun 2007 telah tercatat 12 investor swasta yang menanamkan modalnya di lahan PPN Kejawanan Cirebon ini. PPNK memiliki visi sebagai berikut : Terwujudnya Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Cirebon sebagai Pusat Pengembangan dan pertumbuhan Ekonomi Perikanan Terpadu dan Berdaya Saing. Misi nya adalah :

- a. Revitalisasi Pelabuhan Perikanan.
- b. Pelabuhan sebagai kluster perikanan (pusat pasar ikan).
- c. Peningkatan produksi yang diikuti dengan peningkatan mutu.
- d. Pelabuhan perikanan sebagai pusat informasi dan data statistik perikanan.
- e. Menciptakan lingkungan Pelabuhan Perikanan yang bersih dan higienis.
- f. Pelabuhan Perikanan sebagai fasilitasi wisata bahari.
- g. Penyerapan tenaga kerja yang diharapkan oleh bangsa dan negara.
- h. Pelabuhan Perikanan sebagai tempat pemantauan dan pengawasan (monitoring & control) sumberdaya ikan.

Tugas pokok PPNK adalah melaksanakan fasilitasi produksi dan pemasaran hasil perikanan di wilayahnya, pengawasan dan pemanfaatn sumberdaya ikan untuk pelestariannya, dan kelancaran kegiatan kapal perikanan, serta pelayanan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan. Fungsinya adalah Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 16/MEN/2006, Pelabuhan Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas perikanan
- b. Pelayanan bongkar muat kapal.

¹⁷Buku Profil Kementerian Kelautan Dan Perikanan Direktorat Jendral Perikanan Tangkap Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan Kota Cirebon.

- c. Pelaksanaan mutu dan pengolahan hasil perikanan.
- d. pemasaran dan distribusi ikan.
- e. Pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan.
- f. Pelaksanaan Penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan.
- g. Pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan.
- h. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan.
- i. Pelaksanaan kesyahbandaran.
- j. Pelaksanaan fungsi karantina ikan.
- k. Publikasi hasil riset kelautan dan perikanan.
- l. Pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari.

Pengendalian lingkungan (kebersihan, keamanan, dan ketertiban (K3), kebakaran dan pencemaran) PPN Kejawanan memiliki peran sebagai fasilitator mempunyai tujuan antara lain untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan/petani ikan. menampung hasil laut yang kemudian akan di olah menjadi makanan yang berharga tinggi oleh industri. Melalui Kementerian Kelautan, tentu yang mengelola pantai kejawanan adalah PPN (Pelabuhan Perikanan Nusantara). Salah satu untuk menciptakan kondisi tersebut, PPN Kejawanan telah bekerja sama dengan beberapa investor swasta yang bergerak dibidang perikanan, tahun 2007 telah tercatat 12 investor swasta yang menanamkan modalnya di lahan PPN Kejawanan Cirebon ini. Ini berarti bahwa PPN kejawanan sebagai fasilitator untuk memudahkan para nelayan dalam melakukan bongkar muat atau pelelangan ikan yang dihasilkan dari melaut. Adapun bagi para pemilik modal atau investor yang ingin menanamkan modalnya di sektor perikanan, PPN kejawanan menyediakan lahan sebagai bentuk apresiasinya kepada para investor

untuk meningkatkan hasil laut yang ada di kota Cirebon.

Namun peran PPN bagi kesejahteraan nelayan belum menyentuh pada nelayan dengan kapal kecil. Menurut pak Surip, adanya PPN kejawanan tidak memberikan dampak yang besar bagi kemudahannya dalam menjual hasil tangkapan lautnya. Karena menurut pak Surip PPN kejawanan hanya menampung ikan-ikan yang besar saja, jadi ikan yang ditangkap oleh nelayan samadikun terkadang tidak bisa dijual di PPN Kejawanan.¹⁸ Menurut pak Suparman, adanya PPN kejawanan tidak memberikan dampak yang besar bagi kemudahannya dalam menjual hasil tangkapan lautnya. Karena menurut pak Suparman nelayan cangkol lebih suka menjual hasil tangkapannya ke pasar ketimbang menjual ke PPN, dikarenakan harganya yang lebih besar jika dijual ke pasar.¹⁹ Menurut pak Kadir, adanya PPN kejawanan tidak memberikan dampak yang besar bagi kemudahannya dalam menjual hasil tangkapan lautnya. Karena menurut pak kadir ada beberapa hal yang menurutnya enggan bekerja sama dengan pihak PPN Kejawanan, antar lain:

- a. Harganya lebih murah dan tidak sesuai di pasaran.
- b. Tempatnya jauh, jadi nelayan pesisir enggan bongkar muat hasil laut disana.
- c. Para nelayan pesisir tidak terlalu paham dengan peraturan yang ada di PPN Kejawanan.²⁰

Terdapat TPI PPN Kejawanan saat ini merupakan satu-satunya TPI yang masih

¹⁸Wawancara Dengan Bapak Surip Sebagai Nelayan Samadikun Kapal Kecil, *Pendapatan Menjadi Nelayan*, tanggal 24 Juli 2014, Pukul 09.30 WIB.

¹⁹Wawancara Dengan Bapak Suparman Sebagai Nelayan Cangkol Kapal Kecil, *Pendapatan Menjadi Nelayan*, tanggal 24 Juli 2014, Pukul 11.30 WIB.

²⁰Wawancara Dengan Bapak Kadir Nelayan Pesisir Kapal Kecil, *Pendapatan Menjadi Nelayan*, tanggal 24 Juli 2014, Pukul 10.10 WIB.

beraktivitas dan terbesar di kota Cirebon. Pada awalnya kota Cirebon memiliki empat TPI, namun karena jumlah ikan tangkapan nelayan tidak banyak dan lebih ditujukan untuk konsumen yang mengkonsumsi ikan secara langsung, maka tidak terdapat aktivitas di tiga TPI kota Cirebon tersebut. Selain hal tersebut, pengaruh bakul yang kuat memaksa nelayan-nelayan kecil yang berhutang kepada bakul menjual langsung ikan hasil tangkapannya kepada bakul. Ikan hasil tangkapan nelayan kecil dijual kepada bakul sebagai pembayaran hutang.

Di TPI PPN Kejawanen sendiri tidak terdapat lagi aktivitas lelang ikan hasil tangkapan. Aktivitas yang terdapat di TPI hanya penimbangan dan pencatatan jumlah ikan hasil tangkapan maupun nilai dari total penjualannya oleh KUD. Kegiatan pelelangan ikan di TPI PPN Kejawanen hanya dilakukan pada satu tahun pertama setelah PPN Kejawanen didirikan. Pada tahun berikutnya proses lelang ditiadakan karena jumlah pembeli yang tidak banyak. Tingkat persaingan pembeli untuk memperoleh ikan di TPI Kejawanen rendah sehingga kekuatan tawar nelayan lemah dan harga ikan yang diperoleh nelayan dari hasil lelang tidak terlalu menguntungkan. Nelayan juga tidak terlalu menyukai untuk berlabuh di PPN Kejawanen dengan alasan jauh dari tempat tinggalnya.

Saat ini pasokan ikan yang terdapat di PPN Kejawanen berasal dari kapal-kapal yang dimiliki oleh industri pengolahan ikan, perusahaan penangkapan ikan dan pemilik kapal yang telah melakukan kerja sama dengan pedagang pengumpul atau industri pengolahan ikan untuk menjual hasil tangkapannya kepada pihak industri pengolahan ikan. Nelayan penangkap ikan pada kapal-kapal tersebut merupakan nelayan pekerja (buruh) yang memperoleh upah dari pemilik kapal. Banyaknya upah yang diterima

nelayan pekerja tergantung oleh lamanya kapal menangkap ikan. Pemilik kapal memberikan upah bersih Rp. 20.000 per hari melaut kepada setiap nelayan yang bekerja di kapalnya.

PPN Kejawanen berperan sebagai pengelola pantai Kejawanen yang menjadi salah satu potensi wisata. Pengunjung bisa menikmati warung-warung seafood dan berwisata keliling pantai menggunakan perahu motor milik nelayan dan melihat nelayan membawa hasil lautnya. Kondisi ini turut meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan kejawanen.

Kesimpulan

Kehidupan para nelayan di wilayah PPN Kejawanen Cirebon dalam keadaan memprihatinkan, karena dalam sekali melaut pendapatan mereka tidak sebanding dengan pengeluaran untuk solar, makan/minum, dan logistik lainnya. Sementara kondisi tempat pelelangan ikan tidak semuanya aktif hanya satu. Pemberdayaan yang dilakukan PPN Kejawanen belum cukup mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Saran

Saran yang diberikan yaitu memberikan penyadaran, pendidikan, pendampingan, pelatihan keterampilan dan penyuluhan tentang teknik penangkapan ikan, manajemen keuangan, manajemen lingkungan hidup dan etos kerja termasuk *achievement and motivation* secara berkesinambungan. Kemudian, untuk jangka panjang harus ada fasilitas bantuan dari pemerintah dalam hal ini PPN yang lebih mendaya-gunakan nelayan. Misalnya, langkah menciptakan alternatif mata pencarian lapangan kerja seperti budidaya rumput laut, budidaya kepiting soka, industri pengolahan hasil, laut, dan sebagainya.

Daftar Pustaka

- Buku Profil Kementerian Kelautan Dan Perikanan Direktorat Jendral Perikanan Tangkap Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan Kota Cirebon.
- Dahuri, Rokhmin, *Cetak Biru Pembangunan Kelautan dan Perikanan*, 2012.
- Dahuri, Rokhmin, *Dukungan IPTEK untuk pembangunan Kelautan*, Bogor: RODA Bahari, 2012.
- Dahuri, Rokhmin, *Mengelola Pembangunan Berkelanjutan*, Bogor: RODA Bahari, 2012.
- Dahuri, Rokhmin, *The Blue Future of Indonesia*, Bogor: RODA Bahari, 2013.
- Fathul Amri, *Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karangsong Indramayu*, 2002.
- Mohamad, Lestari, *Studi Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Di Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang*, 2000.
- Rexy, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda, 2007.
- Nasib Pantai Kejawanan Yang Masih Terabaikan*, <http://www.fahmina.or.id/artikel-a-berita/berita/1117-nasib-pantai-kejawanan-yang-masih-terabaikan.html> (Diakses 20 Juli 2014).
- Nelayan Cirebon Hidup Dalam Kondisi Keprihatinan*, <http://suaragratiatfm.wordpress.com/2012/11/23/nelayan-cirebon-hidup-dalam-keprihatinan/>. (Diakses 20 juli 2014).
- Wawancara Dengan Bapak Surip Sebagai Nelayan Samadikun Kapal Kecil, *Pendapatan Menjadi Nelayan*, tanggal 24 Juli 2014, Pukul 09.30 WIB.
- Wawancara Dengan Bapak Suparman Sebagai Nelayan Cangkol Kapal Kecil, *Pendapatan Menjadi Nelayan*, tanggal 24 Juli 2014, Pukul 11.30 WIB.
- Wawancara Dengan Bapak Surip Sebagai Nelayan Samadikun Kapal Kecil, *Pendapatan Menjadi Nelayan*, tanggal 24 Juli 2014, Pukul 09.30 WIB.
- Wawancara Dengan Bapak Suparman Sebagai Nelayan Cangkol Kapal Kecil, *Pendapatan Menjadi Nelayan*, tanggal 24 Juli 2014, Pukul 11.30 WIB.
- Wawancara Dengan Bapak Kadir Nelayan Pesisir Kapal Kecil, *Pendapatan Menjadi Nelayan*, tanggal 24 Juli 2014, Pukul 10.10 WIB.